



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 13																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

# Anggaran KPU Rp39

## Milyar Belum Final

“Angka Ini Cenderung Dinamis”

**SANGGAU-RK.** KPU Kabupaten Sanggau mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Sanggau 2018 sebesar Rp39 milyar. Jumlah ini jauh lebih besar dari Pilkada sebelumnya yang ‘hanya’ Rp14 milyar. Ketua KPU Sanggau, Sekundus Ritih mengaku angka Rp39 milyar itu belum final.

“Kita juga akan koordinasi dengan KPU Provinsi, karena akan ada sharing dana. Sebab, Pilkada Sanggau bersamaan dengan Pilgub. Rakor pertama sudah dilakukan dengan provinsi dengan lima kabupaten lain, sekitar Agustus 2016. Setelah itu nanti akan ada kumpul lagi mematangkannya itu,” ungkapnya ditemui di Kantor KPU Sanggau, Kamis (22/9).

Selain itu, ada beberapa bagian yang mau dicek. “Artinya beberapa item yang berbeda

dengan kita ajukan,” ujarnya.

Pihaknya juga tengah menunggu beberapa aturan dari KPU Pusat. Yang terbaru saat ini adalah aturan tentang pencalonan. Dan kemungkinan akan ada lagi perbaikan-perbaikan. “Sampai dengan satu bulan lalu, seperti itu. Tapi angkanya bisa saja berubah. Pertama karena ada kemungkinan aturan baru, misalnya seperti pencalonan yang tadinya sample menjadi sensus, otomatis biaya bertambah. Ada konsekuensi-konsekuensi itu. Makanya angka kita ini cenderung dinamis. Tahun lalu itu Rp14 milyar, untuk dua putaran. Kalau sekarang ini kan satu putaran,” terangnya.

Rencananya dana Rp39 milyar itu akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2017, mengingat KPU Sanggau baru mengusulkan

sekitar Agustus-September 2016. “Tapi itu tergantung lagi Peraturan KPU (PKPU). Untuk memulai tahapan itu berdasarkan PKPU, karena kan serentak ni untuk daerah, Pilgub, Pileg untuk 2018. Sekarang ini yang ada itu PKPU untuk 2017, kalau di sini itu Landak dan Kota Singkawang,” bebernya.

Sembari menunggu PKPU, KPU Sanggau terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun Pemerintahan Desa (Pemdes). Termasuk adanya kemungkinan pemekaran. “Karena kan berdampak pada kemungkinan penambahan penyelenggara. Juga terhadap para penyelenggara, kita sudah sosialisasi di sembilan kecamatan. Untuk PPK dan PPS itu kan tak boleh dua periode. Sebagian besar itu akan banyak diubah dan direkrut baru,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengaku telah menyampaikan usulan anggaran

KPU tersebut ke Ketua DPRD. Prinsipnya, kata PH, sapaan akrabnya, Pemkab Sanggau setuju sepanjang sesuai aturan dan jika memang menjadi kewajiban daerah memenuhinya.

“Saya kira tak ada masalah. Makanya nanti ditelaah. Apalagi kita kan ada PKPU yang baru, mungkin ada penyesuaian. Soal jumlah, seara pribadi belum bisa mendalami. Ini kan ada tim, nanti ada diskusi. Akan dilihat juga dasar angka-angkanya ini dari mana. Apa sih yang perlu dibantu pemerintah daerah dalam konteks Pilkada,” katanya.

Selain itu, Pemkab akan akan membandingkan dengan daerah lain yang juga menyelenggarakan Pilkada. “Kita tak mau tak sesuai aturan. Tapi mudah-mudahan, KPU sendiri mengajukan itu sudah berdasarkan aturan yang ada,” pungkasnya.

**Laporan: Kiram Akbar**



**Sekundus Ritih**